

PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Maria Sri Angelina Ruku Sare Ora
yuyunsareora22@yahoo.com

Yuliasuti Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to examine the influence of good governance, and performance audit, to the finance accountability. The population is local apparatus working unit in Surabaya and the sample collection technique has been done by using purposive sampling and 74 people have been obtained samples. The data analysis technique has been carried out by using multiple linear regressions method. The result of the test shows that independent variables which consist of the implementation of good governance and performance audit give simultaneously influence to the State Finance Accountability, This result indicates that the fluctuation of State Finance Accountability of local apparatus working unit in Surabaya depend on how well the good governance and performance audit which has been applied by the institution. This result is supported by the contribution which has given by those variable to the State Finance Accountability of local apparatus working unit in Surabaya i.e. 32,4% whereas the remaining is 67.6% has been contributed by other factors. The result of partial test shows that each of the implementation variable of good governance and audit performance, give positive and significant influence to the state finance accountability. The result indicates that when the implementation of good governance, and audit performance, it will improve the state finance accountability.

Keywords: the implementation of good governance, performance audit, state finance accountability.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *good governance* dan audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Surabaya dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga sampel yang didapat berjumlah 74 orang. Adapun teknik analisis data menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri penerapan *good governance* dan audit kinerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan. Hasil ini mengindikasikan bahwa naik turunnya akuntabilitas keuangan pemerintahan SKPD Kota Surabaya tergantung oleh seberapa baik *good governance* dan audit kinerja yang diterapkan oleh instansi tersebut. Hasil ini didukung dengan kontribusi yang diberikan variabel tersebut terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan SKPD Kota Surabaya sebesar 32,4% sedangkan sisanya 67,6% dikontribusi oleh faktor lainnya. Pengujian secara parsial memperlihatkan masing-masing variabel penerapan *good governance* dan audit kinerja mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan. Hasil ini mengindikasikan semakin baik penerapan *good governance* dan audit kinerja yang dilakukan akan semakin meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintahan.

Kata kunci : penerapan *good governance*, audit kinerja, akuntabilitas keuangan pemerintahan

PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia baik di provinsi, kota, maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama. Hal tersebut karena beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja. Masyarakat ingin

tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Prinsip tata kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23C tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan spesialis. Selain asas tersebut dalam rangka penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara juga ditetapkan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Bentuk kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diterapkan dengan peraturan pemerintah. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat (Zeyn, 2011). Menurut Rinaldi (2016) faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yaitu *good governance* dan audit kinerja. Pengertian *good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif pada kinerja sektor publik atas ekonomi dan efisiensi suatu program, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, fungsi yang melakukan aktifitas dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Harun, 2009). Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai "Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan".

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dikemukakan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan ? (2) Apakah audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan ? Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui apakah penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. (2) Untuk mengetahui apakah audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

TINJAUAN TEORITIS

Good Governance

Good Governance adalah pemerintahan yang baik. Dalam versi World Bank, *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politician framework* bagi tumbuhnya aktivis usaha. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam

suatu Negara. *Governance* adalah kata sifat dari *govern*, yang diartikan sebagai *the action of manner of governing* atau tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian. Sebagai sebuah kata, *governance* sebenarnya tidaklah baru. Pada tahun 1590 kata ini dipahami sebagai *state og being governed*, berkembang menjadi *mode living* (1600), kemudian menjadi *the office, function, or power of governing* (1643), berkembang menjadi *method of management, system of regulation* (1660) dan kemudian dibakukan menjadi *the action or manner governing*. Sementara itu, berarti *to rule with authority* atau mengatur atas nama kewenangan. Pelaksananya biasa disebut sebagai *government* yang selain mempunyai arti sempit sebagai *action of ruling and directing the affairs of a state*, atau pelaksanaan pengaturan dan pengarahan urusan-urusan negara. Dengan demikian *government* identik dengan pengelolaan atau pengurus dengan makna spesifik atau pengurus negara (Riant, 2004).

Good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang. *Agent of change* dan karena perubahan yang dikehendaknya, menjadi *planned change* (perubahan yang berencana), maka disebut juga *agent of development*. *Agent of development* diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijakan-kebijakan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan anggaran penting. Dengan perencanaan dan anggaran juga menstimulusi investasi sektor swasta. Kebijakan dan persetujuan penanaman modal di tangan pemerintah. Dalam *good governance* peran pemerintah tidak lagi dominan, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam *good governance*. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. *Good Governance* di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance* (Riant, 2004)..

Audit Kinerja

Secara etimologi, audit kinerja terdiri atas dua kata, yaitu "audit" dan "kinerja". Audit menurut Arens, *et al*, (2012) adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi terhadap bukti-bukti yang dilakukan oleh yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan menurut Indra (2007) kinerja merupakan sesuatu yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dari kedua definisi tersebut, terlihat bahwa istilah kinerja mengarah pada dua hal yaitu proses dan hasil yang dicapai. Definisi yang cukup komprehensif yaitu Pasal 4 ayat (3) UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mendefinisikan audit kinerja sebagai audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Kemudian, berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP mendefinisikan audit kinerja sebagai audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai bukti untuk menilai kinerja

entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya menurut Indra (2007) audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit.

Akuntabilitas Keuangan

Governmental Accounting Standard Board (GASB), (1999, part 56) dalam penelitian yang dilakukan oleh Zeyn (2011), mengemukakan tentang akuntabilitas sebagai berikut: *"Accountability requires government to answer to the citizenry to justify the raising of public resources and purposes for which they are used. Governmental accountability is based on the belief that the citizenry has a right to know, right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their selected representatives, financial reporting play a mayor role in fulfilling government's duty to be publicly accountable in a democratic society"*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada rakyat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Hopwood dan Tomkins (1984), Ellwood (1993), Mahmudi (2005:10) dan Rasul (2003) dalam penelitian Zeyn (2011), mengemukakan salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas financial (keuangan) dimana mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. Pemerintah daerah melaksanakan amanah dari masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dalam pertanggungjawabannya. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami Schiavo-Campo dan Tamosi (1999) dalam penelitian Zeyn (2011). Salah satu akuntabilitas yang penting berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar, Mardiasmo (2002) dalam penelitian Zeyn (2011). Akuntabilitas keuangan sangat terkait dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Rencana Kerja Anggaran (RKA) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja. Penyusunan RKA berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang *komprehensif*. *Content* pelaporan, keakurasian angka-angka yang tertera di laporan keuangan dan dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memadai dengan pengendalian yang baik akan sangat menentukan akuntabilitas pelaporan itu sendiri. Angka-angka yang memang mencerminkan transaksi, setiap peristiwa ekonomi yang mengakibatkan perubahan terhadap suatu entitas. Angka-angka yang mencerminkan kinerja sesungguhnya, angka-angka yang menggambarkan peristiwa sesungguhnya. Dengan demikian laporan keuangan menjadi transparan, relevan, reliabel dan tepat waktu sangat didambakan, yang sangat berguna (Yuhertiana, 2007).

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha, Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₁ : Penerapan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Berkaitan dengan audit kinerja, inspektorat yang merupakan auditor internal pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit kinerja. Dimana dengan dilakukannya audit kinerja, auditor melakukan proses audit untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti untuk melakukan penilaian secara independen atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini apakah pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, hukum, dan kebijakan yang berlaku, dan apakah terdapat kesesuaian antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₂ : Audit Kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang digunakan berbentuk angka-angka. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan penentuan sampel untuk tiap SKPD ditentukan secara proporsional. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Populasi dari Penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel Teknik penelitian ini menggunakan purposive sampling, artinya sampel perusahaan dipilih, dipertimbangkan, dan diteliti agar sampel data yang dipilih memenuhi kriteria untuk diuji. Kriteria dalam penentuan sampel berdasarkan teknik purposive sampling antara lain: (1) Kepala Dinas (2) Kepala bagian akuntansi/penatausahaan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan dijawab langsung oleh subjek penelitian mengenai pengaruh penerapan *good governance* dan audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, yang mana data merupakan data yang diperoleh dari responden dengan cara membagikan kuesioner kepada satuan kerja perangkat daerah yaitu kepala dinas dan kepala bagian akuntansi/penatausahaan keuangan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel ini yang dibagi menjadi variabel independen dan dependen yang merupakan variabel yang akan digunakan sebagai alat ukur.

Variabel Independen

Penerapan *Good Governance*

Penerapan *good governance* diukur dengan beberapa indikator yang mengacu pada penelitian Zeyn (2011), yaitu: keterlibatan masyarakat, kerangka hukum yang kuat, orientasi kebijakan, transparansi informasi, ketanggapan, responsif terhadap aspirasi, keterbukaan pemerintah, memberikan kesempatan kepada masyarakat, pengelolaan sumber daya, tata pemerintahan yang baik, pertanggungjawaban publik, memiliki visi, efisiensi penggunaan sumber daya.

Audit Kinerja

Indikator audit kinerja mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Suratmi dan Nyoman (2014), yaitu: mengikuti ketentuan, pelaksanaan audit, pengadaan sumber daya telah sesuai, perlindungan sumber daya, menghindari duplikasi pekerjaan, menghindari penggunaan sumber daya berlebihan, efisiensi prosedur kerja, minimalisasi penggunaan sumber daya, patuh terhadap peraturan perundang-undangan ukuran efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan, menentukan tingkat pencapaian hasil program, program saling melengkapi tidak tumpang tindih, mengidentifikasi pelaksanaan program, ketaatan pelaksanaan program, sistem pengendalian manajemen, pertanggungjawaban efektifitas program.

Variabel Dependen

Akuntabilitas Keuangan

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan. Pengukuran variabel akuntabilitas keuangan diukur dengan beberapa indikator yang mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Zeyn (2011), yaitu: pengakuan asset, pengakuan pendapatan, pencatatan asset, pencatatan kewajiban, penyajian transaksi, penyajian peristiwa lain, perlakuan akuntansi per-periode.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas

Tujuan dari uji validitas data adalah melihat apakah variabel atau pertanyaan yang diajukan mewakili segala informasi yang seharusnya diukur atau validitas menyangkut kemampuan suatu pertanyaan atau variabel dalam mengukur apa yang harus diukur. Uji validitas dilakukan atas item-item pertanyaan pada kuesioner yaitu dengan jalan menghitung koefisien korelasi dari tiap-tiap pertanyaan dengan skor total yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan angka kritis r produk moment. Bila koefisien korelasinya lebih besar dari pada nilai kritis maka suatu pertanyaan dianggap valid (Ghozali, 2012).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban yang diperoleh dari pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara one shot metode atau pengukuran sekali saja. Untuk mengukur reliabilitas dengan melihat cronbach alpha. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha

masing-masing variabel lebih dari 60% atau 0,6 maka penelitian ini dikatakan reliabel, (Ghozali, 2012).

Analisis Regresi Linier Berganda

Digunakan peneliti untuk mengetahui masing-masing variabel yang mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebab rasio yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel sehingga dapat diperoleh perumusan linier berganda sebagai berikut:

$$AKKEU = a + \beta_1 PGG + \beta_2 AK + \beta_3 SAP + e$$

Keterangan:

AKKEU	: akuntabilitas keuangan
PGG	: penerapan <i>good governance</i>
AK	: audit kinerja
SAP	: standar akuntansi pemerintahan
a	: Konstanta
β_x	: Koefisien regresi
e	: Error

Pengujian Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model digunakan untuk menguji model persamaan regresi dalam penelitian ini. Sehingga dengan melakukan uji F dapat mengetahui apakah variabel *good governance* dan audit kinerja layak atau tidak digunakan dalam penelitian Ghozali (2012):

(1) Jika nilai signifikansi Uji F > 0.05, maka model yang dihasilkan tidak layak digunakan sebagai prediktor. (2) Jika nilai signifikansi Uji F < 0.05, maka model yang dihasilkan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengujian yang digunakan, sebagai berikut : Jika sig t > 0,05, menunjukkan variabel penerapan *good governance* dan audit kinerja dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan. Jika sig t < 0,05, menunjukkan variabel penerapan *good governance* dan audit kinerja secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya akan mengukur seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas dan sebaliknya (Ghozali, 2012:97).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berdasarkan hasil validitas terkait pengaruh *governance* dan audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan daerah tersaji pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Uji Validitas masing-masing Variabel

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	Tingkat Sig	Keterangan
Penerapan Good Governance	Butir PGG 1	0,575	0,000	Valid
	Butir PGG 2	0,609	0,000	Valid
	Butir PGG 3	0,559	0,000	Valid
	Butir PGG 4	0,473	0,000	Valid
	Butir PGG 5	0,668	0,000	Valid
	Butir PGG 6	0,513	0,000	Valid
	Butir PGG 7	0,575	0,000	Valid
	Butir PGG 8	0,538	0,000	Valid
	Butir PGG 9	0,594	0,000	Valid
	Butir PGG 10	0,604	0,000	Valid
	Butir PGG 11	0,505	0,000	Valid
	Butir PGG 12	0,427	0,000	Valid
	Butir PGG 13	0,479	0,000	Valid
Audit Kinerja	Butir AK 1	0,244	0,036	Valid
	Butir AK 2	0,306	0,008	Valid
	Butir AK 3	0,319	0,011	Valid
	Butir AK 4	0,329	0,012	Valid
	Butir AK 5	0,326	0,024	Valid
	Butir AK 6	0,352	0,002	Valid
	Butir AK 7	0,317	0,016	Valid
	Butir AK 8	0,304	0,038	Valid
	Butir AK 9	0,494	0,000	Valid
	Butir AK 10	0,321	0,029	Valid
	Butir AK 11	0,325	0,032	Valid
	Butir AK 12	0,302	0,041	Valid
	Butir AK 13	0,320	0,040	Valid
	Butir AK 14	0,306	0,036	Valid
	Butir AK 15	0,323	0,049	Valid
Akuntabilitas Keuangan	Butir AKKeu 1	0,321	0,038	Valid
	Butir AKKeu 2	0,313	0,038	Valid
	Butir AKKeu 3	0,316	0,032	Valid
	Butir AKKeu 4	0,307	0,045	Valid
	Butir AKKeu 5	0,306	0,038	Valid
	Butir AKKeu 6	0,285	0,014	Valid
	Butir AKKeu 7	0,323	0,025	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa semua item pernyataan berkaitan dengan penerapan *good governance* dan audit kinerja serta akuntabilitas keuangan mempunyai memiliki signifikansi uji korelasi dibawah 0,05 sehingga kuesioner yang disebarkan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur instrumen dengan menunjukkan tingkat kehandalan tertentu. Suatu instrumen dapat dikatakan memiliki tingkat kehandalan yang dapat diterima apabila nilai koefisien reliabilitas terukur lebih besar dari 0,6. Perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach*.

Dari uji reliabilitas terlihat nilai *cronbach's alpha* yang dihasilkan sebesar 0,832 lebih besar 0,60 yang berarti butir-butir pernyataan dari seluruh variabel seluruhnya reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan statistic didapatkan hasil analisis regresi berganda sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,395	4,765		2,391	,019
Penerapan Good Governance	,126	,040	,328	3,178	,002
Audit Kinerja	,210	,083	,263	2,542	,013

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Data Primer Diolah

Dari data tabel di atas persamaan regresi yang didapat adalah
 $AKKEU = 11,395 + 0,126PGG + 0,210AK$

Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut : (1)Konstanta (a) Merupakan intersep garis regresi dengan Y jika $X = 0$, yang menunjukkan besarnya variabel dependen yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut. Besarnya nilai konstanta (1) adalah 11,395 menunjukkan bahwa jika variabel bebas yang terdiri dari penerapan *good governance* dan audit kinerja sebesar 0, maka akuntabilitas keuangan pemerintah daerah akan 11,395. (2) Koefisien regresi penerapan *good governance*. Besarnya nilai koefisien regresi penerapan *good governance* sebesar 0,126 dan bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel tersebut dengan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan *good governance* akan semakin baik tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. (3) Koefisien regresi penerapan audit kinerja besarnya nilai koefisien regresi audit kinerja sebesar 0,210 dan bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel tersebut dengan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pelaksanaan audit kinerja akan semakin baik tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Asumsi Klasik yang telah dilakukan diperoleh hasil, yaitu sebagai berikut :

Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji melalui pendekatan grafik, yaitu grafik *Normal P-P Plot of resresion standard*, dengan pengujian ini disyaratkan bahwa distribusi data penelitian harus mengikuti garis diagonal antara 0 dan pertemuan sumbu X dan Y.

Dari grafik hasil penelitian dapat diketahui bahwa distribusi data telah mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum. Prob.*) dengan sumbu X (*Observed Cum Prob.*) Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel tersebut lebih kecil dari 10 dimana nilai *tolerance* penerapan *good governance* sebesar 0,907 dan nilai *tolerance* audit kinerja sebesar 0,900 dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut juga dengan bebas dari Multikolinieritas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t - 1$ (Ghozali, 2012:110). Dalam penelitian ini data yang digunakan bukan data time series atau data yang diambil pada waktu tertentu, sehingga untuk Uji Autokorelasi tidak dilakukan.

Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual (kesalahan pengganggu) satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pendeteksian adanya heteroskedastisitas menurut Ghozali (2012:139), jika sebaran titik-titik berada di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dari hasil penelitian terlihat gambar heteroskedastisitas pada regresi linear berganda titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisa lebih lanjut.

Pengujian Hipotesis

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model digunakan untuk menguji model persamaan regresi dalam penelitian ini. Sehingga dengan melakukan uji F dapat mengetahui apakah variabel *good governance* dan audit kinerja layak atau tidaknya digunakan sebagai prediktor (Ghozali, 2012). Jika nilai signifikansi Uji F > 0.05 , maka model yang dihasilkan tidak layak digunakan sebagai prediktor. Jika nilai signifikansi Uji F < 0.05 , maka model yang dihasilkan layak digunakan prediktor.

Tabel 3
Anova^a

ANOVA ^a						
Model		Sum Of Squares	df	Mean square	F	Sig.
1	Regression	205,637	2	68,546	11,184	,000 ^b
	Residual	429,011	70	6,129		
	Total	634,649	72			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Data Primer Diolah

Dari tabel 3 didapat tingkat signifikan uji F = 0,000 lebih kecil 0,05 (*level of significant*) yang mengindikasikan bahwa pengaruh variabel bebas yang terdiri dari penerapan *good governance* dan audit kinerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan. Hasil ini mengindikasikan model yang digunakan dalam penelitian layak dilanjutkan pada analisa berikutnya.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase kontribusi variabel penerapan *good governance* dan audit kinerja secara bersama-sama terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan. Hasil pengujian yang telah dilakukan tampak pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,569 a	,324	,295	2,47563

a. Predictors: (Constant), Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Data Primer Diolah

Hasil pengujian tersebut di atas diketahui r square (r²) sebesar 0,324 menunjukkan sumbangan atau kontribusi dari penerapan *good governance* dan audit kinerja secara bersama-sama terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan sebesar 32,4%. Sedangkan sisanya (100 % - 32,4% = 67,6%) dikontribusi oleh faktor lainnya.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengujian yang digunakan, sebagai berikut: Jika sig t > 0,05, menunjukkan variabel penerapan *good governance* dan audit kinerja dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan. Jika sig t < 0,05, menunjukkan variabel penerapan *good governance* dan audit kinerja secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan

Hasil pengujian uji t dan tingkat signifikansi dari masing-masing variabel terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Tingkat Signifikan Masing-Masing Variabel

Variabel	t_{hitung}	Sig	Keterangan
Penerapan <i>good governance</i>	3,178	0,002	Signifikan
Audit kinerja	2,542	0,013	Signifikan

Sumber : Data Primer Diolah

Dari tabel 5 diatas selanjutnya dapat diuraikan pengaruh masing-masing model penelitian terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan sebagai berikut ; Uji pengaruh variabel penerapan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan diperoleh tingkat signifikan variabel penerapan *good governance* sebesar 0,002 lebih kecil 0,050 (*level of significant*), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian pengaruh variabel tersebut terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan adalah signifikan. Uji pengaruh variabel penerapan audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan dari tabel 5 diperoleh tingkat signifikan variabel audit kinerja sebesar 0,013 lebih kecil 0,050 (*level of significant*), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian pengaruh variabel tersebut terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan adalah signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan

Hasil pengujian menunjukkan pengaruh penerapan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan adalah signifikan dan positif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi (2016) dan Darmanto (2017), yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah. Hasil ini mencerminkan semakin baik penerapan *good governance* pada SKPD kota Surabaya akan semakin kepercayaan pengelolaan keuangan pada instansi tersebut.

Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam membuat suatu keputusan kebijakan publik dengan sistem dan aturan-aturan hukum yang berlaku dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat serta adanya jaminan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai akan menekan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi.

Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan

Hasil pengujian menunjukkan pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan adalah signifikan dan positif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Suratmi, et.al, (2014), Darmanto (2017), dan Rinaldi (2016) yang menyatakan bahwa audit kinerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil ini mencerminkan semakin baik pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan pada SKPD kota Surabaya seperti pelaksanaan audit kinerja yang mengikuti ketentuan yang berlaku, pengadaan sumber daya baik jenis, mutu dan jumlah telah sesuai dengan kebutuhan dengan biaya terendah. Auditor juga mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya Negara serta melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dana efisiensi akan semakin kepercayaan

pengelolaan keuangan pada instansi tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti yang dilakukan secara independen atas program/kegiatan pemerintah yang diaudit akan meningkatkan kepercayaan serta mengurangi keragu-raguan atas hasil audit kinerja keuangan pemerintahan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas; perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan pekerja antara organisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang jelas dan informatif. Perubahan dan perbaikan dapat terjadi karena temuan atau rekomendasi audit. Umumnya, rekomendasi dapat menjadi kunci atas perubahan dan perbaikan. Oleh sebab itu, penyusunan rekomendasi yang baik perlu diperhatikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengaruh penerapan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan adalah signifikan dan positif. Hasil ini mencerminkan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam membuat suatu keputusan kebijakan publik dengan sistem dan aturan-aturan hukum yang berlaku dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dan akan menekan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi.

Pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan adalah signifikan dan positif. Hasil ini mencerminkan adanya pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti yang dilakukan secara independen atas program/kegiatan pemerintah yang diaudit akan meningkatkan kepercayaan serta mengurangi keragu-raguan atas hasil audit kinerja keuangan pemerintahan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen serta penyajian informasi yang jelas dan informative

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang pengaruh penerapan *good governance* dan audit kinerja, dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah, maka saran yang dapat penulis ajukan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Guna mencapai pemerintah yang *good governance* Hendaknya setiap SKPD memiliki website resmi dengan membublikasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunaan anggaran yang telah berlangsung sehingga publik mengetahui pengelolaan keuangan dan kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung dan hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat luas.

Hendaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat SKPD Kota Surabaya dilakukan secara berkala dan mengingat terbatasnya jumlah pengawas maka perlu melakukan rekrutmen untuk menambah sumber daya manusia yang ada sehingga semua ranah SKPD dan perangkat dibawahnya bisa terjamah untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah

Untuk mewujudkan akuntabilitas maka wujud pertanggung jawaban pemerintah bisa dilaksanakan setiap kegiatan atau selesainya program kegiatan berlangsung sehingga masyarakat tidak memiliki tanggapan yang negatif. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini

bisa dilaksanakan melalui perantara internet maupun wartawan dengan media televisi dan radio. Mengingat peran internal audit menjadi sangat penting dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan hendaknya fungsi internal audit dapat terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., R. J. Elder, M. S. Beasley. 2012. *Auditing & Jasa assurance* Edisi 12. Penerbit Erlangga Jakarta.
- Darmanto, F. K. 2017. Pengaruh Penerapan Good Governance , Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ellwod, S. 1993. Parish Town and Councils: Financial Accounting and Management. *Local Government Studies*. 19: 368-386.
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. Concepts Statement No. 1 : *Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34 : Basic Financial Statement and Management Discussion and analysis for State and Local Government*. Norwalk.
- Ghozali, I. 2012. *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harun, 2009. *Reformasi dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Hopwood, A. dan C. Tomkins. (Editor). 1984. *Issues In Public Sector Accounting*. Oxford. Philip Allan. Newyork.
- Indra, B. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- _____. 2011. *Audit Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nyoman. S. 2014. Pengaruh Audit Kinerja terhadap Peningkatan kinerja keuangan PDAM Tirta Pakuwan Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi* 1(1): 21-36.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rasul, S. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU no. 17/2013 Tentang *Keuangan Negara*. PNRI. Jakarta.
- Riant, N. D. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia. Jakarta.
- Rinaldi, R. R. 2016. Pengaruh Penerapan Good Governance , Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Solo.
- Schiavo-Campo,S dan Tomasi, D. 1999. *Managing Government Expenditure*. Asia Development Bank. Manila.
- Suratmi, N. M., T. Nyoman, dan A. Nyoman. 2014. Pengaruh Audit Kinerja Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik. *E-Jurnal* 1(1): 30-45.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Yuhertiana, I. 2007. Principal-Agent Theory dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi* 1(2): -422.

Zeyn, E. 2011. Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Review Akuntansi Dan Keuangan*. 1(1): 1-15.